PENGATURAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Tinjauan Perpres Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Anindita

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Jl. Ndalem Mangkubumen KT III/237, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kemudian untuk mengetahui secara yuridis yang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. bertujuan pemantauan regulasi tentang penerimaan bukan pajak pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Target dalam penelitian ini adalah sumbangsih pemikiran terkait pengawasan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Penelitian ini mengambil sumber data menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif yang tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Analisis Data untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah perlindungan hukum keuangan negara dalam sektor penerimaan negara bukan pajak.

Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan dari hal itu perlu adanya perlindungan pengaturan hukum terkait dengan keuangan negara.

PENDAHULUAN

Pungutan terhadap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa menurut Undang-undang kepada masyarakatnya mempunyai tujuan agar negara memiliki pemasukan yang dapat dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga negara tersebut dapat membangun dan memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan negara. Sehingga peran pemerintah dalam pelaksanaan dibidang penerimaan dan pengeluaran negara sangat penting, pemerintah dapat mengendalikan pengelolaan keuangan secara terpadu dan harmonis kearah kebijaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis. Tidak hanya berfungsi untuk menciptakan anggaran yang berimbang akan tetapi berimbang dalam arti yang selalu meningkat. Semua penerimaan negara berasal dari sumber-sumber pendapatan yang di tetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam APBN.¹

¹ Meita Amallia, Analisis Sistem Pnbp Untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pada Kppn Surabaya I dalam *Jurnal*

Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu unsur penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah : (a) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; (b) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; (c) Menunjang Kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; (d) Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.²

Pada tahun 2002 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Kemudian sehubungan dengan adanya jenis penerimaan negara bukan pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional, penyederhanaan dalam penetapan tarif penerimaan negara bukan pajak, serta dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.³

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah; *pertama*, Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak?. *Kedua*, Untuk mengetahui pengaturan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai wadah perlindungan hukum keuangan negara?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat, *pertama*; Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan dan kebijakan dalam upaya untuk menciptakan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara dalam sektor PNBP sebagai upaya perlindungan terhadap keuangan negara. *kedua*, Sebagai dasar pijakan untuk analisis penelitian lebih lanjut

Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 12 (2015), hlm 2-3

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁴

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 mengatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan salah satunya penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁵ Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya.⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/lembaga.⁷

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala.⁸ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

⁸ Indonesia, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Sebagai lembaga pemerintah, BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹³⁰ Organisasi dan fungsi BPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Unit organisasi BPN Pusat (Eselon I) terdiri dari: Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan Inspektorat Utama. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Sampai saat ini tercatat ada 33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 409 Kantor Pertanahan.⁹

PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spritual. Agar tujuan tersebut terwujud maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, dalam rangka pencapaian cita-cita pembangunan negara. Pendapatan negara dan hibah adalah salah satu dari struktur APBN yang diperoleh dari: 1) Penerimaan pajak, 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 3) Penerimaan Hibah dari dalam Negeri dan luar Negeri.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. PNBP mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target APBN yang diharapkan pemerintah. Untuk mencapai target PNBP, diperlukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah di bidang pendapatan negara. Sesuai dengan UU No.20 Tahun 1997 tentang PNBP, PNBP dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
4. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
5. Penerimaan yang berasal dari hibah yang menjadi hak pemerintah; dan
6. Penerimaan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan dampakpeneanaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraankegiatan pemerintahan sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam peneanaan beban terhadap masyarakat.

Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN. Siklus pengelolaan PNBPN dimulai dari tahap perencanaan (penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN), pelaksanaan (penentuan jumlah PNBPN terhutang, pemungutan dan penagihan atas jumlah PNBPN terhutang, serta pembayaran dan penyetoran atas jumlah PNBPN terhutang) dan pertanggungjawaban PNBPN. Karena luasnya lingkup pengelolaan PNBPN maka tidak sedikit masalah yang timbul dalam pengelolaan PNBPN. BPK dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN sering menemukan masalah pengelolaan PNBPN seperti pungutan PNBPN tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN, PNBPN terlambat/belum disetor ke kas negara dan PNBPN digunakan langsung tanpa disetor ke kas Negara.

Peranan PNBPN SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dariSDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Hal ini dapat dilihat dari dataLaporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d 2012 dan UU No.15 Tahun2013 tentang APBN-P Tahun 2013 dimana kontribusi rata-rata SDA migas danSDA non-migas mencapai 65% dari total PNBPN. Gambar 1 menunjukkankontribusi masing-masing per jenis PNBPN sedangkan tabel 1 menunjukkanrealisasi per jenis PNBPN sejak 2008 s.d 2012 dan rencana per jenis PNBPN Tahun2013.

Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:¹⁰

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga NegaraBelanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau InstansiPemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- k. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:¹¹

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹¹ Ibid Pasal 2

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
 3. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau RuangPerairan.

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.¹²

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau RuangPerairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).¹³

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:¹⁴

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).¹⁵

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:¹⁶

- a. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
- b. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:¹⁷

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

¹² Ibid pasal 3

¹³ Ibid pasal 5

¹⁴ Ibid pasal 6

¹⁵ Ibid pasal 10

¹⁶ Ibid pasal 11

¹⁷ Ibid pasal 13

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:¹⁸

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.¹⁹

Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal Dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j yang ditujukan untuk masyarakat adalah sebesar biaya Pensertifikatan Tanah PRONA tahun berjalan. Kerja sama yang dilakukan dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBN/APBD.²⁰

Tarif Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k untuk:

- a. Perorangan melalui reforma agraria adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
- b. Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- c. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari nilai tanah;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tanah;
- e. Badan Hukum Swasta adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai tanah.

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
- c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. masyarakat tidak mampu;
- b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
- c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;

¹⁸ Pasal 15

¹⁹ Ibid pasal 18

²⁰ Ibid pasal 19

- d. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
- e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
- f. Wakif; atau
- g. Masyarakat Hukum Adat.

Terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang akan menjaminkan tanah dan bangunan atau rumah susun yang berasal dari Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
 - c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
 - d. badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Perlindungan Hukum Keuangan Negara dalam Sektor PNB

PNBP mempunyai fungsi sebagai perlindungan keuangan negara. Secara spesifik dapat diperinci menjadi dua jenis:

- a. Fungsi Budgeter, dimaksudkan bahwa PNB sebagai fungsi pembiayaan maka harus diupayakan uang memasukkan uang yang sebesar-besarnya kedalam kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan.
- b. Fungsi Reguler (pengaturan), PNB mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi,

sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan/jasa dari negara yang dilakukan oleh departemen/lembaga, penjualan barang milik negara baik yang dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, dan penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara.

Selain berfungsi sebagai salah satu penerimaan, PNBP dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan, seperti dalam kebijaksanaan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006. PNBP juga berfungsi sebagai unit swadana atas beberapa satuan kerja tertentu dari instansi pemerintahan yang akan dapat melakukan dan mendorong peningkatan mutu pelayanan, memperlancar tugas pelayanan yang diberikan. PNBP sebagai wujud penerimaan juga mampu memberikan rasa kebersamaan dalam mengelola dan membiayai pengeluaran dari berbagai unit/departemen/lembaga yang dalam proses mencapai tujuan harus berjalan bersama dan saling mendukung satu sama lainnya.

KESIMPULAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. PNBP mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target APBN yang diharapkan pemerintah.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:²¹

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- k. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana meliputi:²²

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:

²¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

²² Ibid Pasal 2

- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
- d. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
- e. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
- f. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- g. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.

PNBP mempunyai fungsi sebagai perlindungan keuangan negara. Secara spesifik dapat diperinci menjadi dua jenis:

- a. Fungsi Budgeter, dimaksudkan bahwa PNBP sebagai fungsi pembiayaan maka harus diupayakan uang memasukkan uang yang sebesar-besarnya kedalam kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan.
- b. Fungsi Reguler (pengaturan), PNBP mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.
- Amallia, Meita, Analisis Sistem Pnbp Untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pada Kppn Surabaya I dalam *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 12 (2015)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000